



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA INDIASTUTI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 266580

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.455.000.000

1. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 493.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/280 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.640.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/84 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.880.000.000
4. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/187 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah Seluas 9940 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI
Rp. 292.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 343.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 195.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV HATCHBACK Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 135.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.337.408.080



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 11.270.408.080

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.270.408.080

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.